

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 BAB III TENTANG TERTIB KEBERSIHAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Oleh:
RISTIANTO PADILAH
NIM. E102131087

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
e-mail: ris.fad3390@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Bab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara.. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai/parit atau menumpuk sampah dipinggir jalan/tanah kosong dan masih banyaknya warga yang menumpuk dan membakar sampah ditepi jalan. Penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983: 35). Teori Mazmanian dan Sabatier sesuai dengan kebijakan penanganan permasalahan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut. Hasil penelitian terkait dengan aspek-aspek penelitian sebagai berikut : a). karakteristik masalah menunjukkan bahwa warga mengeluhkan letak TPS yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka memilih menumpuk sampah di lahan kosong untuk kemudian dibakar, selain itu masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku bangsa dan tingkat pendidikan, dengan beragam suku bangsa dan tingkat pendidikan masyarakat maka pemahaman kebijakan pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan sampah juga akan berbeda. B). Karakteristik kebijakan menunjukkan bahwa isi kebijakan penanganan sampah sudah cukup jelas dan memiliki dukungan teoritis yang kuat. Sehingga selanjutnya apakah warga mematuhi perda kebijakan penanganan sampah ini atau tidak, kembali kepada individu masing-masing warga. c). Lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara cukup kondusif dengan beragam etnis dan budaya karena banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara, mengenai kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara sudah cukup baik, rata-rata termasuk dalam kelas menengah, sedangkan mengenai kemajuan teknologi masyarakat kecamatan Pontianak Tenggara sudah termasuk maju dalam hal teknologi, hal ini didukung dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang berdiri di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara. Namun sebagian warga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan dalam Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib kebersihan. Hal ini terbukti dengan masih adanya warga yang membuang sampah di pinggir jalan, menumpuk dan membakar sampah di lahan kosong, membuang sampah di TPS namun di luar container dan di luar waktu yang ditentukan. Saran peneliti yaitu pihak Kecamatan Pontianak Tenggara bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak semestinya menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai dan terus mensosialisasikan tentang kebijakan penanganan sampah pada masyarakat.

Kata-kata kunci : Implementasi Kebijakan, Permasalahan Sampah, Ketertiban Umum.

Abstract

This study aims to find out and reveal the factors that affect the implementation of the Regional Regulation No. 1 / 2010 Chapter III concerning Sanitary Control in the Subdistrict of Southeast Pontianak. The problem of this research is that there are still many people who throw garbage into the river / canals or and many of them also pile up and burned garbage on the side of street. This study uses the theory Mazmanian and Sabatier (1983: 35). the Theory of Mazmanian and Sabatier is in accordance with the policy for handling the waste problem in the Subdistrict of Southeast Pontianak where society is the target of the policy. The results of research related to aspects of the study are as follows a). the characteristics of the problem show that people complained about the location of temporary disposal sites which are far enough away from where they live, so they chose to

accumulate garbage in vacant land and then burned it; in addition, the people in subdistrict of Southeast Pontianak are a pluralistic society with different ethnic groups and levels of education, then the interpretation of the city government in waste management was also different. b). the characteristics of the policy suggests that the content of waste management policy is quite clear and has a strong theoretical support, so whether people follow the regulations of this waste management policy or not depends on the individual. c). the environmental policy suggests that the social condition of the people in the subdistrict of Southeast Pontianak is conducive with diverse ethnicities and cultures because of the number of students from outside the area who live there; the economic condition of society in the subdistrict of Southeast Pontianak is good enough, in average they belong to the middle class; whereas the technological advancement of Southeast Pontianak subdistrict, the community is well off in terms of technology; it is supported by the presence of several universities the subdistrict of Southeast Pontianak. However, some people do not fully support the implementation of the Regulation No 1 / 2010 Concerning Public Order, especially related to sanitary regulation. This is proved by the fact that there are still people who throw garbage on the side of the road, piling up and burning trash in vacant lots, throw garbage at the temporary disposal sites, but outside the container and outside the specified time. The researcher suggests that the subdistrict of Southeast Pontianak should cooperate with the Office of Sanitation and Landspaing of Pontianak City to provide temporary disposal sites (TPS) that should were adequate and keep socializing on waste management policy to the society.

Keywords: Policy Implementation; Waste Problems; Public order.

A. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pontianak berisi hal-hal yang mengatur ketertiban masyarakat, terdiri dari Bab I yaitu membahas mengenai Ketentuan Umum yang berisi definisi atau pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Perda ini, selanjutnya Bab II yang berjudul Pengendalian, Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban yang menekankan pentingnya Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait.

Selanjutnya Bab III membahas mengenai Ketertiban Kebersihan, yang pada intinya mewajibkan seluruh warga masyarakat untuk berperan aktif dalam

pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah industri, dalam Bab ini juga berisi beberapa larangan dan kewajiban masyarakat dalam tertib kebersihan, selanjutnya Bab IV berjudul Tertib Bangunan dan Usaha yang berisi larangan dan kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam mendirikan suatu bangunan dan atau mendirikan suatu usaha. Selanjutnya Bab V membahas mengenai Tertib Lingkungan yang berisi antara lain larangan dan kewajiban masyarakat untuk menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing, misalnya dilarang membesarkan volume alat-alat musik atau pengeras suara diatas pukul 22.00 WIB. Bab-bab berikutnya yaitu Bab VI sampai dengan Bab XII berturut-turut berjudul Tertib Sungai, Parit dan Salura, Tertib Parkir dan Angkutan

Jalan Raya, Tertib Usaha Tertentu, Tertib Sosial, Penyidikan dan Bab terakhir berjudul Ketentuan Penutup.

Pada Penelitian ini peneliti secara khusus membahas Bab III tentang Tertib Kebersihan dalam Perda No. 1 Tahun 2010 dan penerapannya di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, (Senin, 22 Februari 2016) Kota Pontianak setiap harinya menghasilkan 300 ton sampah dan 30 persen di antaranya merupakan sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan kembali. Sebagai daerah yang sedang dan terus membangun, Kecamatan Pontianak Tenggara juga tidak luput dari masalah sampah. Di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara terdapat 2 (dua) lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berlokasi di Jl. Parit Haji Husin terdiri dari 3 (tiga) container dan di Jl. Sepakat II terdiri dari 1 (satu) container sampah. Masalah sampah masih menjadi permasalahan serius bagi Kecamatan Pontianak Tenggara, Fakta yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa TPS di Jl.S Sepakat II banyak sampah yang menumpuk diluar container dan diluar waktu yang ditentukan, sementara sampah-sampah terlihat menumpuk di pinggir jalan dapat ditemui di Jl. Reformasi, Jl.Media, Jl. Sepakat I, Jl. Parit Haji Husin I dan Jl. Sungai Raya Dalam (depan rumah sakit dr. Soedarso), umumnya sampah rumah

tangga dikumpulkan kemudian dibakar di tepi jalan atau di lahan kosong. Bila ini dipertahankan maka dapat mencemari lingkungan dan hasil pembakaran tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan yang akhirnya berkontribusi pada pemanasan global seperti yang telah dirasakan saat ini.

Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga perlu terus ditingkatkan serta didorong menuju perilaku hidup sehat dan tertib, yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi :

1. Pasal 9 ayat 2

Setiap pemilik, penghuni, penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan pekarangan rumahnya dan termasuk tanaman, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, serta parit dan lain-lainnya.

2. Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya,kecuali di tempat-tempat sampah yang

telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan TPS serta tempat-tempat umum lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai/parit atau menumpuk sampah dipinggir jalan/tanah kosong dan masih banyaknya warga yang menumpuk dan membakar sampah ditepi jalan. Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Bab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Berdasarkan masalah yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah ini, maka peneliti tertarik untuk menulis Jurnal Ilmiah berjudul "Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2010 BAab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara."

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Ada beberapa teori tentang kebijakan di antaranya yaitu; menurut Titmuss (2000: 12) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Studi mengenai pembuatan kebijakan publik merupakan studi yang sangat penting dalam administrasi negara. Prinsip tersebut akan ditinjau lebih lanjut dari kebijakan publik sendiri menurut para ahli. Menurut H. Hugh Heglo (dalam Abidin 2004:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson (dalam Islamy,

1997:4) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik konsep dasar bahwa: kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Sebagaimana penjelasan Islamy (1997:5) kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public* (dalam Agustino 2006:139)

mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

”Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya ditataran rendah. Elmore dkk (dalam Nugroho 2004).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:35), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

a. Karakteristik masalah:

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat

masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

- 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda.

b. Karakteristik kebijakan:

- a) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan

teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

- c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

c. Lingkungan kebijakan:

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Pada teori Edwards III implementasi kebijakan hanya dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi, sedangkan menurut pakar lain lingkungan luar juga berperan besar dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam kamus Webster (Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, di mana "*to implementasi*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).Selanjutnya Wahab (1997:65) mengungkapkan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Menurut Wahab (1991:45), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Ia juga mengatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 sudut pandang yakni: "(1) pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center* atau pusat); (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); (3) aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program

itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran (*target group*)” (Wahab, 1997:63).

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai “*Out come*” (hasil akhir) kegiatan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut “*Policy delivery system*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Wahab, 1990:123-124).

Penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983: 35) Model Mazmanian dan Sabatier ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Teori Mazmanian dan Sabatier sesuai dengan kebijakaan penanganan permasalahan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara di mana masyarakat

sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Bab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain (domain analysis), merupakan analisis domain (bidang) dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta / wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan.

D. PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian menggunakan teori implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 35) dimana terdapat tiga variabel dalam implementasi kebijakan yaitu;

Karakteristik masalah, Karakteristik kebijakan, Lingkungan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti meneliti Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Bab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai berikut;

1. Karakteristik Masalah:

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, namun sampah juga merupakan tanggung jawab masyarakat penghasil sampah itu sendiri. Perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat untuk memperhatikan lingkungannya dan tidak mengangggap sepele permasalahan sampah. Karena jika permasalahan sampah ini dibiarkan maka akan menjadi sangat susah untuk diselesaikan. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak Y, beliau menyatakan ;
“masalah sampah ini sudah sering kita bahas bersama aparat kelurahan sampai tingkat RT dan RW, dari kami juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh masyarakat Kecamatan

Pontianak Tenggara untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi masalah ini kembali pada kesadaran warga masing-masing, kami sudah berusaha mensosialisasikan Perda tentang sampah, sudah kami sampaikan sanksi-sanksinya apabila tertangkap tangan sedang membuang sampah tidak pada tempat atau tidak pada waktunya, masih ada saja warga yang buang sampah seandainya ditumpuk di lahan kosong di pinggir jalan bahkan ada juga yang dibakar, ini semua dilarang didalam Perda itu”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa karakteristik masalah sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempat dan waktunya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang warga, Bapak I, beliau menyatakan ;

“kami sebenarnya sudah tahu kalau harus buang sampah di TPS dari jam 6 sore sampaijam 6 pagi, tapi yang kami keluhkan jarak TPS terdekat dari rumah kami ini lumayan jauh, memang ada motor yang bisa angkut sampah, tetapi

terkadang malas juga kalau TPS nya jauh, praktisnya ya kami tumpuk di lahan kosong nanti kalau sudah agak banyak tinggal dibakar”

Dari hasil wawancara dengan seorang warga di atas menunjukkan bahwa sebenarnya warga sudah tahu tentang kewajiban membuang sampah pada tempat dan waktunya, tetapi warga mengeluhkan letak TPS yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka memilih menumpuk sampah di lahan kosong untuk kemudian dibakar.

b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran.

Suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak Y, beliau menyatakan bahwa ;
“komposisi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara ini cukup majemuk, beraneka ragam suku

bangsa dan tingkat pendidikan, karena letak geografis kecamatan ini yang sangat strategis, didekat fasilitas pendidikan dan pusat pemerintahan yang otomatis banyak penduduk pendatang baik yang menetap maupun musiman seperti misalnya mahasiswa yang tinggal di rumah kos-kos sekitaran kampus”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku bangsa dan tingkat pendidikan. Hal ini tentu mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara, karena dengan beragam suku bangsa dan tingkat pendidikan masyarakat maka pemahaman kebijakan pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan sampah juga akan berbeda.

2. Karakteristik kebijakan:

a).Kejelasan isi kebijakan.

Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya,

ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak Y, beliau menyatakan bahwa ;

“saya rasa isi perda tentang sampah ini sudah sangat jelas maksud dan tujuannya, selain itu kami juga mengeluarkan surat edaran kepada warga melalui ketua RT dan RW nya tentang penanganan sampah ini, jadi ya saya rasa sudah sangat jelaslah isi perda kebijakan penanganan sampah ini”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kejelasan dari perda penanganan masalah sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara sudah sangat jelas, karena selain isi perda penanganan sampah itu sendiri, pihak kecamatan juga mengeluarkan surat edaran kepada warganya mengenai kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang warga, Bapak C, beliau menyatakan bahwa ;
“peraturan masalah sampah ini kami sudah tahu, karena dari pak

RT juga ada menghimbau jangan buang sampah di lahan kosong, sampah tidak boleh dibakar, buang sampah ke TPS cuma boleh dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, masalah yang gitu-gitu kami sudah lama tahu”

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa kejelasan isi kebijakan penanganan sampah sudah cukup jelas bagi masyarakat. Sehingga selanjutnya apakah warga mematuhi perda kebijakan penanganan sampah ini atau tidak, kembali kepada individu masing-masing warga.

b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Program yang dilakukan dalam penanganan sampah yang dilakukan dinas kebersihan Kecamatan Pontianak Tenggara mengajak warga berpartisipasi dalam penanganan sampah. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak Y, beliau menyatakan :

“Dukungan teoritis kebijakan ini menurut saya sudah cukup kuat, masalah sampah ini sudah menjadi perhatian semua pihak dan tidak hanya di level Kota Pontianak saja, masalah sampah ini sudah menjadi perhatian nasional bahkan dunia, karena berkaitan erat dengan isu kesehatan, kebersihan, keindahan lingkungan dan isu pemanasan global.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum memiliki dukungan teoritis yang cukup kuat, yang menjadi dasar diterbitkannya Perda ini untuk mengatur ketertiban umum dan kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara

3. Lingkungan Kebijakan.

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Pada hakatnya lingkungan merupakan tempat tinggal dimana semua aktivitas berlangsung. Dalam konteks ini lingkungan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam berkelanjutan hidup, adapun upaya dalam penanganan sampah

merupakan hal yang perlu dijaga demi kesehatan karena sampah merupakan masalah pokok terhadap lingkungan sekitar kita dan perlu diatasi secara bersama demi kenyamanan bersama.

Mengenai masalah ini peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak Y, beliau menyatakan;

“mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi menurut saya masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara sudah cukup maju kemampuan ekonomi walaupun rata-rata masih menengah, secara sosial masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara terdiri dari beragam etnis dan agama, dan banyak dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari luar daerah, yang selama ini cukup kondusif, mengenai kemajuan teknologi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara juga sudah cukup maju, karena disini terdapat beberapa pusat pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi”

Dari wawancara di atas kita ketahui bahwa kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara cukup

kondusif dengan beragam etnis dan budaya karena banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara, mengenai kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara sudah cukup baik, rata-rata termasuk dalam kelas menengah, sedangkan mengenai kemajuan teknologi masyarakat kecamatan Pontianak Tenggara sudah termasuk maju dalam hal teknologi, hal ini didukung dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang berdiri di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Dukungan masyarakat dalam implementasi Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Pontianak Tenggara mutlak diperlukan agar kebijakan tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga masyarakat. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Trantib Kecamatan

Pontianak Tenggara, Bapak Y, beliau menyatakan ;

“bicara masalah dukungan masyarakat ini yang terus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa Perda ini tujuannya baik supaya lingkungan tempat tinggal kita ini bersih dan sehat, maka dari itu kita mohon dukungan warga supaya tertib kebersihan, tidak buang sampah sembarangan apalagi dibakar di pinggir jalan. Sejauh ini dukungan dan partisipasi warga dalam hal masalah sampah ini saya perhatikan sebagian kecil sudah mau mengikuti aturan, dan disayangkan sebagian lainnya belum mematuhi aturan dalam Perda ini, kita terus memberi pengertian kepada warga supaya mereka mau membuang sampah pada tempatnya dan diwaktu yang ditentukan yaitu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi”

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dukungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dalam implementasi Perda No.1 Tahun 2010 dalam hal Tertib Kebersihan belum maksimal, masih ada sebagian warga yang membuang sampah dipinggir jalan, ditumpuk dan dibakar di lahan kosong dan masih ada juga warga yang membuang

sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) namun diluar container dan diluar waktu yang ditentukan yaitu dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Ketua RT di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak R, beliau menyatakan ;
“saya mendapat arahan dari kecamatan bahwa untuk disampaikan kepada warga untuk membuang sampah di TPS dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, dilarang membuang sampah di pinggir jalan apalagi sampai dibakar, dan semua itu sudah saya sampaikan ke warga saya namun masih ada saja yang membuang sampah di pinggir jalan dan membakar sampahnya, alasan mereka itu karena TPS nya jauh, padahal kalau menurut saya jarak TPS tidak terlalu jauh apalagi hampir semua orang sekarang sudah punya kendaraan, selain itu ada juga tukang sampah yang membawa gerobak yang mau mengambil sampah namun mereka keberatan membayar Rp.30.000 per bulan”

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dukungan masyarakat untuk membuang

sampah pada tempatnya memang masih kurang, masih ada warga yang membuang sampah di pinggir jalan dan membakar sampah di lahan kosong, mereka beralasan karena Tempat Pembuangan Sementara (TPS) cukup jauh.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang warga, Bapak I, beliau menyatakan ;
“kami sudah pernah membahas masalah sampah ini bersama pak RT saat rapat bulanan, kami sebenarnya setuju dengan aturan harus buang sampah di TPS dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tapi kami merasa TPS nya jauh dari rumah, dulu awal-awal saya rajin buang sampah malam ke TPS pakai motor, tapi saya perhatikan tetangga kanan kiri saya mereka buang sampahnya dilahan kosong sebelah rumah, akhirnya saya ikut juga buang sampah disitu, karena kadang terasa capek malam-malam puang kerja buang sampah ke TPS yang lumayan jauh”.

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dukungan dan partisipasi warga untuk membuang sampah di TPS masih kurang, karena jarak yang cukup jauh akhirnya para warga buang sampah

di pinggir jalan atau di lahan kosong.

Dari hasil beberapa wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara belum mendukung implementasi kebijakan dalam Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib kebersihan. Hal ini terbukti dengan masih adanya warga yang membuang sampah di pinggir jalan, menumpuk dan membakar sampah di lahan kosong, membuang sampah di TPS namun di luar container dan di luar waktu yang ditentukan

E. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dengan senantiasa memperhatikan tujuan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Pontianak Tenggara berikut peneliti uraikan kesimpulan dari hasil pembahasan :

1. Karakteristik masalah

Karakteristik masalah sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempat dan waktunya. Warga sudah tahu tentang kewajiban membuang sampah pada tempat dan waktunya, tetapi warga mengeluhkan letak TPS yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka memilih menumpuk sampah di lahan kosong untuk kemudian dibakar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku bangsa dan tingkat pendidikan. Hal ini tentu mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara, karena dengan beragam suku bangsa dan tingkat pendidikan masyarakat maka pemahaman kebijakan pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan sampah juga akan berbeda

2. Karakteristik kebijakan

Peraturan Daerah mengenai penanganan masalah sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara sudah sangat jelas, karena selain isi perda penanganan sampah itu sendiri, pihak kecamatan juga mengeluarkan surat edaran kepada warganya mengenai

kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kejelasan isi kebijakan penanganan sampah sudah cukup jelas bagi masyarakat. Sehingga selanjutnya apakah warga mematuhi perda kebijakan penanganan sampah ini atau tidak, kembali kepada individu masing-masing warga. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum memiliki dukungan teoritis yang cukup kuat, yang menjadi dasar diterbitkannya Perda ini untuk mengatur ketertiban umum dan kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

3. Lingkungan kebijakan

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara cukup kondusif dengan beragam etnis dan budaya karena banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara, mengenai kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara sudah cukup baik, rata-rata termasuk dalam kelas menengah, sedangkan mengenai kemajuan teknologi masyarakat kecamatan Pontianak Tenggara sudah termasuk maju dalam hal teknologi, hal ini didukung dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang berdiri di

wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebagian masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara belum mendukung implementasi kebijakan dalam Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib kebersihan. Hal ini terbukti dengan masih adanya warga yang membuang sampah di pinggir jalan, menumpuk dan membakar sampah di lahan kosong, membuang sampah di TPS namun di luar container dan di luar waktu yang ditentukan.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, berikut peneliti uraikan saran-saran dalam menyikapi hasil penelitian.

1. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib kebersihan agar terus disampaikan pada masyarakat dalam setiap waktu dan kesempatan. Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara dapat juga bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk melakukan sosialisasi kepada siswa dan mahasiswa mengenai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban

Umum di Kecamatan Pontianak Tenggara.

2. Selain sosialisasi yang lebih digenjarkan perlu juga penegakan hukum dengan pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khususnya mengenai tertib kebersihan di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.
3. Penambahan jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) agar mudah diakses oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan.

G. REFERENSI

- Abdulah Wahab, solicshin (1997). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Agustino. L, 2006, "Dasar-dasar Kebijakan Publik", Bandung; Alfabeta
- Creswell, J.W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication Inc.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- George Edward III, (1980:1) , *Teori Implementasi kebijakan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan*
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Moleong, LExy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya
- Mustopadjaja, AR. (2003) *Good Governance Manajemen Sumber Daya Aparatur*. Jakarta LAN RI
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi (2008), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Suprihatin. Agung dkk (1999) *Sampah Dan Pengelolanya*. Edisi Kedua. Penerbit PPGT/VEDC Malang bekerjasama dengan Swisscontact. Malang
- Sugiyono (2000) *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Kedelapan. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Titmuss, R. 2000, "What is Social Policy?", 4 Maret 2016, melalui Econ.boun.edu.tr, pukul 13.55 WIB.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RISTIANTO PADILAH
 NIM / Periode lulus : 61012131087 / 2016
 Tanggal Lulus : 23 Agustus 2016
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : rts.fed.3390@gmail.com / 085245186693

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
Bab III Tentang Tertib Kebersihan di Kecamatan
Pontianak, Tanjung

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Pardi, M.A.B.
 NIP. 1929052002121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 27 Maret 2017

R. Stianto Padilah
 NIM. 61012131087

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)